

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP PENERIMAAN OPINI  
*GOING CONCERN* PADA PERUSAHAAN  
PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH :**

**DENDI FRANSISKA**

**C1C110012**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

**UNIVERSITAS BENGKULU**

**2014**

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
PENERIMAAN OPINI AUDIT *GOING CONCERN* PADA PERUSAHAAN  
PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Bengkulu Untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

**DENDI FRANSISKA**  
**NPM : C1C110012**

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**2014**

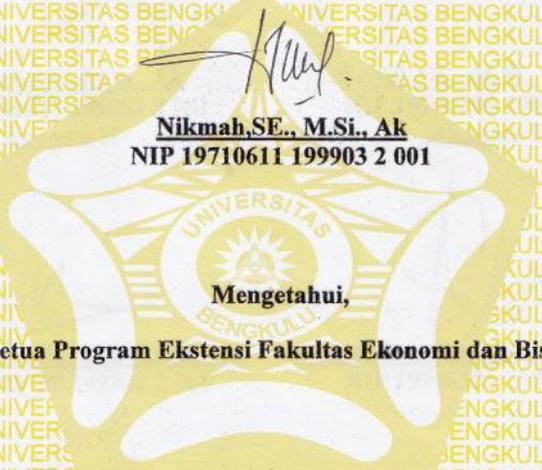
**Skripsi Oleh Dendi Fransiska ini  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

**Bengkulu, 25 Februari 2014**

**Pembimbing,**



**Nikmah, SE., M.Si., Ak  
NIP 19710611 199903 2 001**



**Mengetahui,**

**Ketua Program Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Syamsul Bachri, SE., M.Si.  
NIP 19560102 198603 1 003**

Skripsi oleh Dendi Fransiska ini

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan dipertahankan di depan Dewan  
Penguji pada hari Selasa, 25 Februari 2014

**DEWAN PENGUJI :**

**Ketua**

**Anggota I**

**Nikmah, SE., M.Si., Ak**  
NIP 19710611 199903 2 001  
Anggota II

**Saiful, SE., M.Si., Ph.D., AK**  
NIP.19700108 199702 1 001  
Anggota III

**Sriwidharmanely, SE., MBM., Ak**  
NIP 19720730 199702 2 001

**Isma Coryanata, SE., M.Si., AK, CA**  
NIP 19740306 199903 2 001

Mengetahui,  
a.n Pembantu Dekan I Bidang Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Fahrudin Js. Pareke, SE., M.Si**  
NIP 19710914 199903 1 004



## JURUSAN AKUNTANSI

---

### **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
PENERIMAAN *OPINION CONCERN* PADA PERUSAHAAN  
PERBANKAN DIBURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

Yang diuji pada tanggal 25 Februari 2014, adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat, atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Bengkulu batal saya terima.

Bengkulu, 25 Februari 2014  
Yang Membuat Pernyataan

Dendi Fransiska

## PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- *Ayahanda yang kuhormati, yang senantiasa mendoakan serta memberikan bimbingan semangat dan teladan kepadaku.*
- *Ibunda Jercinta, atas kesabaran, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti padaku.*
- *Jeman-temanku seperjuangan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.*

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
PENERIMAAN OPINI *GOING CONCERN* PADA PERUSAHAAN  
PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA**

Oleh  
Dendi Fransiska<sup>1)</sup>  
Nikmah, SE., Msi., Ak.<sup>2)</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap penerimaan opini *going concern*. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dari seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2008 sampai dengan 2012. Sampel akhir penelitian terdiri dari 30 perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Penelitian ini menemukan bahwa proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*.

***Kata kunci*** : *corporate governance* dan *opini going concern*.

1. Mahasiswa
2. Dosen Pembimbing

**INFLUENCE OF MECHANISM EFFECT CORPORATE GOVERNANCE  
TOWARD ACCEPTANCE GOING CONCERN OPINION AT BANKING  
COMPANY IN STOCK EXCHANGE INDONESIA**

BY

Dendi Fransiska<sup>1)</sup>  
Nikmah, SE., Msi., Ak.<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

The purpose of the research was to examine the influence of corporate governance mechanism toward acceptance of going concern opinion. The method of sample gathered was used purposive sampling from all of banking company in stock exchange in Indonesia during 2008 period until 2012. The last sample of the research used regression logistic analysis to test the hypothesis.

This research found that proportion commissioner independence and managerial property influenced going concern opinion acceptance, while institutional property and audit committee did not influence going concern opinion acceptance.

**Keywords** : corporate governance and opinion going concern

1 . Student

2 . Supervisor

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana S-1 Universitas Bengkulu dengan judul **“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, akan sangat sulit bagi penulis untuk menyusun skripsi ini, tentu sangat dirasakan masih banyak kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya penulis sebagai manusia biasa. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu kelancaraan dalam penulisan karya tulis ini. Secara khusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Nikmah, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Syamsul Bachri SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
3. Bapak Abdullah, SE, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh studi di Universitas Bengkulu.
4. Ibu Nikmah, SE., M.Si., Ak, Bapak Saiful, SE., M.Si., Ph.D., Ak, Ibu Sriwidharmanely, SE., MBM., Ak, Ibu Dra. Nurna Aziza, SE., M.Si., Ak, Ibu Isma Coryanata SE., M.Si., Ak, CA selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi kearah yang lebih baik.
5. Bapak dan ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Bapak Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
7. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc. Ak selaku Rektor Universitas Bengkulu.
8. Keluargaku tercinta, terima kasih atas segala doa dan dukungannya
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Bengkulu, 25 Februari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Teori Keagenan .....	7
2.2 Opini Audit.....	8
2.3 Opini Audit <i>Going Concern</i> .....	10
2.4 <i>Corporate Governance</i> .....	11
2.5 Komisaris Independen.....	12
2.6 Kepemilikan Manajerial .....	14
2.7 Kepemilikan Institusional.....	15
2.8 Komite Audit.....	15
2.9 Penelitian Terdahulu.....	16
2.10 Kerangka Pemikiran .....	18
2.11 Pengembangan Hipotesis.....	19
2.11.1 Komisaris Independen dan Opini Audit <i>Going Concern</i> .....	19
2.11.2 Kepemilikan Manajerial dan Opini <i>Going Concern</i> .....	20
2.11.3 Kepemilikan Institusional dan Opini Audit <i>Going Concern</i> ....	21
2.11.4 Komite Audit dan Opini Audit <i>Going Concern</i> .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	26
3.4.1 Variabel Dependen .....	26
3.4.2 Variabel Independen.....	26
3.4.2.1 Komisaris Independen.....	27

3.4.2.2 Kepemilikan Manajerial .....	27
3.4.2.3Kepemilikan Institusional .....	28
3.4.2.4Komite Audit.....	28
3.5 Metode Analisis .....	
283.5.1	
Regresi Logistik .....	29
3.6 Pengujian Hipotesis .....	29
a. Menilai Kelayakan Model Regresi .....	30
b. Menilai Keseluruhan Model ( <i>Overall Model Fit</i> ) .....	30
c. Model <i>Summary</i> .....	30
3.6.1 Menguji Koefisien Regresi .....	30
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Sampel Penelitian .....	32
4.2 Statistik Deskriptif .....	32
4.3 Analisis Regresi Logistik.....	35
4.3.1 Menguji Kelayakan Regresi .....	35
4.3.2 Menilai Keseluruhan Model ( <i>Overall Model Fit</i> ) .....	36
4.3.3 Model <i>Summary</i> .....	36
4.3.4 Pengujian Hipotesis .....	37
4.4 Pembahasan .....	39
4.5.1 Komisaris Independen dan Opini <i>Going Concern</i> .....	39
4.5.2 Kepemilikan Manajerial dan Opini <i>Going Concern</i> .....	40
4.5.3 Kepemilikan Institusional dan Opini <i>Going Concern</i> .....	41
4.5.4 Komite Audit dan Opini <i>Going Concern</i> .....	42
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	44
5.2 Implikasi Penelitian .....	45
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	46
5.4 Saran .....	46

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian.....	32
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	33
Tabel 4.3 Hasil Pengujian <i>Hosmer and Lemeshow Test</i> .....	35
Tabel 4.4 Hasil Pengujian <i>Overall Model Fit</i> .....	36
Tabel 4.5 Hasil Pengujian <i>Model Summary</i> .....	37
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis.....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran .....	18
-------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Nama-Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian.....	53
2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	57
3. Hasil Pengujian Regresi Logistik.....	57
4. Hasil Pengujian Hosmer and Lemeshow Test.....	57
5. Hasil Pengujian Iteration History Step 0.....	57
6. Hasil Pengujian Iteration HistoryStep 1.....	58
7. Hasil Pengujian Model Summary.....	58
8. Hasil Pengujian Variabel in the Equation.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan perusahaan yang dihasilkan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Menurut PSAK No.1 (IAI, 2009) tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Manajemen dalam menyajikan laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang sebenarnya, untuk menyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan benar, maka diperlukan pihak eksternal untuk menyakinkan pihak yang berkepentingan. Pihak yang dinilai independen dalam hal ini adalah auditor. Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis tetapi juga masyarakat luas.

Pada saat ini, auditor mulai diminta pertanggungjawabannya untuk mengungkapkan informasi yang tidak sebatas hanya pada pada hal-hal yang

ditampilkan dalam laporan keuangan tetapi juga harus mengungkapkan informasi seperti eksistensi dan kontinuitas entitas (Sihotang, 2012).

Auditor diharapkan tidak hanya memeriksa laporan keuangan atau mendeteksi kecurangan tetapi juga sanggup memprediksi dan menilai kemampuan perusahaan dalam melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu, *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) mensyaratkan bahwa auditor harus mengungkapkan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan kliennya sampai setahun kemudian setelah pelaporan (Januarti, 2009).

Di Indonesia isu mengenai laporan auditor dan hubungannya dengan masalah kelangsungan hidup bagi perusahaan sudah timbul sejak 1995. Isu ini muncul ditandai dengan runtuhnya Bank Summa, Bank Lippo dan Bank Century meskipun bank tersebut telah mengeluarkan laporan audit yang disajikan secara wajar pada tahun sebelumnya ternyata tidak menjamin kelangsungan hidup entitas tersebut.

*Going concern* merupakan kelangsungan hidup sebuah entitas bisnis. Pada saat auditor menetapkan bahwa ada keraguan yang besar terhadap *auditee* untuk melanjutkan usahanya, auditor perlu menyampaikan kondisi tersebut dalam laporan auditnya (Petronila, 2004). Dengan adanya keraguan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya maka, auditor berpendapat bahwa perusahaan yang diaudit akan mengalami gangguan atas keberlangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang (Januarti, 2009).

Untuk mencegah keraguan atas keberlangsungan hidup perusahaan maka pemilik perusahaan harus melaksanakan mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau arah kebijakan yang ditetapkan (Hartas, 2011). Elemen-elemen yang terdapat dalam pengukuran mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Adjani dan Rahardja (2013). Candra (2013), dan Setiawan (2011) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Ndoen (2011) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pemberian opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya komisaris independen berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Adjani dan Rahardja (2013) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. sedangkan penelitian yang dilakukan Riyanda dan Indriani (2013) dan Januarti (2009) menemukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Linoputri (2010), Riyanda dan Indriani (20013) meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan Irfan dan Muid (2012) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Chandra (2013) meneliti pengaruh komite audit terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya komite audit tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. sedangkan Veronica dan Bachtiar (2004), Carcello dan Neal (2000) menemukan komite audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang belum memiliki kesimpulan yang konsisten, maka memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Informasi penting dari auditor adalah opini yang disampaikan ketika melakukan audit atas laporan keuangan yang menitikberatkan pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berterima umum. Mengacu pada uraian diatas dan latar belakang masalah sehingga penelitian ini mefokuskan pada permasalahan mengenai :

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* ?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* ?

### **1.2.1 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap penerimaan opini *going concern*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerimaan opini *going concern*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penerimaan opini *going concern*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap penerimaan opini *going concern*.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi manajemen perusahaan  
Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Bagi investor dan calon investor  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan sehingga keputusan yang tepat dapat diambil oleh para investor dan calon investor dalam berinvestasi.

### 3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai salah satu bahan referensi pengembangan penelitian dalam penelitian selanjutnya serta menjadi penambah wacana keilmuan.

#### **1.4 Batasan/Ruang Lingkup Penelitian**

Periode penelitian ini selama 5 tahun dimulai dari 2008-2012. Perusahaan yang digunakan adalah sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian. Perusahaan yang menerbitkan *annual report* selama periode penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Jensen dan Meckling (1997) menjelaskan tentang adanya hubungan kontrak antar agen (manajemen) dengan pemilik (prinsipal) yang. Pemilik saham (*principal*) merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada pihak manajemen (*agent*) untuk menjalankan kegiatan perusahaan atas nama prinsipal, sedangkan pihak manajemen bertindak sebagai agen yang menerima wewenang tersebut. Sehingga informasi yang dimiliki oleh agen lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilik saham (*principal*), masalah ini disebut sebagai *information asymetries* (Ujiyanto dan Pramuka, 2007).

Asimetri informasi terjadi karena informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen terkait dengan kondisi internal dan prospek perusahaan lebih akurat dibanding dengan prinsipal. Baik prinsipal maupun agen memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dan berusaha memaksimalkannya. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi pihak prinsipal menginginkan laba yang setinggi tingginya, namun disisi lain mendapatkan kompensasi atas kinerja yang bagus guna membuat perusahaan memperoleh keuntungan adalah suatu hal yang diinginkan oleh pihak manajemen (Adjani dan Rahardja, 2013).

Agen sebagai pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan bertanggung jawab dalam menghasilkan laporan keuangan yang memadai, artinya informasi di dalam laporan keuangan tersebut diharapkan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya (Adjani dan Rahardja, 2013). Laporan keuangan tersebut nantinya akan digunakan

prinsipal dalam pengambilan keputusan dalam investasi, sehingga laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

Proses pengambilan keputusan berinvestasi oleh prinsipal dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah informasi yang diterima atas kondisi perusahaan dibanding agen, kemungkinan pembatalan investasi atau berinvestasi dengan beberapa persyaratan, seperti menginginkan harga saham yang rendah. Hal ini pastinya akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga auditor tidak ragu-ragu dalam memberikan opini audit *going concern*. Sehingga dibutuhkan pihak ketiga.

Untuk menjembatani pihak manajemen dan pemilik perusahaan dibutuhkan peranan seorang auditor. Auditor berfungsi untuk memonitor perilaku manajemen apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan pemilik (Setiawan, 2011). Sehingga auditor dalam hal ini bertugas memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dan mengungkapkan permasalahan *going concern* yang dihadapi perusahaan apabila auditor tidak menyakini atas kelangsungan hidup perusahaan (Rudyawan dan Badera, 2008).

Bertumpuh pada teori agensi berkembang berbagai pemikiran yang bersumber dari *corporate governance*, dalam pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Adjani dan Rahardja, 2013).

## **2.2 Opini Audit**

Opini yang dikeluarkan oleh auditor terangkum dalam laporan audit mulai dari diminta tanggung jawabnya untuk mengungkapkan kelangsungan hidup suatu entitas (Adjani dan Rahardja, 2013). Pernyataan pendapat oleh auditor terkait

dengan laporan keuangan disebutkan dalam paragraph pengantar yang terdapat pada paragraf ketiga pada laporan audit baku. Auditor menyatakan kewajaran atas laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material, yang disesuaikan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Terdapat empat opini auditor yang diberikan oleh auditor independen yaitu (Arens dkk, 2008) ;

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian adalah auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan jika memenuhi kondisi seperti, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan, dalam pelaksanaan perikatan seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor, bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas adalah dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas (atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dengan bahasa penjelas

jika terdapat kondisi seperti, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum, keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas, auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, penekanan atas suatu hal laporan audit yang melibatkan auditor lain.

- c. Pendapat tidak wajar adalah auditor merasa yakin bahwa laporan keuangan yang disajikan memuat hasil operasi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat tidak wajar ini hanya dibuat jika auditor memiliki bahan bukti yang cukup melalui penyelidikan yang memadai, tentang ketidaksesuaian tersebut.
- d. Tidak memberikan pendapat adalah auditor tidak berhasil untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. Pernyataan ini timbul karena banyak pembatasan lingkup audit, atau hubungan yang tidak independen antara auditor dan klien menurut etika profesional.

### **2.3 Opini *Going Concern***

*Going concern* merupakan kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Setyarno dkk, 2006). *Going concern* merupakan salah satu konsep yang mendasari pelaporan keuangan (Praptitorini dan Januarti, 2007). Jadi, ketika auditor memberikan opini dengan modifikasi mengenai *going concern* kepada perusahaan yang diaudit atas laporan keuangannya, itu merupakan suatu indikasi bahwa perusahaan yang diaudit beresiko tidak dapat bertahan dalam bisnis atau dengan kata lain, terdapat

kesangsian mengenai kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Santoso dan Wedari (2007) faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpastian tersebut seperti, kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek, kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi/banjir/masalah perburuhan yang tidak biasa dan perkara pengadilan, gugatan hukum/masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

Opini audit yang dikeluarkan auditor dapat menjadi sinyal bahwa suatu perusahaan yang di audit dapat diragukan kelangsungan hidupnya, dalam melaksanakan proses audit auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja tetapi juga harus lebih mewaspadaikan hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup (*going concern*) suatu perusahaan. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa auditor turut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup suatu satuan usaha (Muthahroh, 2013).

#### **2.4 Corporate Governance**

Adi (2011) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

*Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau sering kali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara

pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return* (Ndoen, 2011).

Mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah perusahaan.

*Corpotare governance* merupakan konsep yang didasari oleh teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk menyakinkan investor atas dana yang telah diinvestasikan (Darmawati dan Rahayu, 2004).

## **2.5 Komisaris Independen**

Dalam unsur *corporate governance* terdapat dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi perusahaan sesuai dengan tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mengharuskan terlaksananya akuntabilitas (Adi, 2011). Untuk mencegah munculnya status *going concern* maka dewan komisaris ditugaskan untuk memonitor dan mengawasi benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalagunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan (Adjani dan Rahardja, 2013).

Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Keberadaan komisaris diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang objektif dan menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Jakarta tanggal 1 Juli 2000 yang menjelaskan bahwa perusahaan *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini mensyaratkan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Adapun kriteria lain tentang Komisaris Independen yang dikemukakan oleh Bursa Efek Jakarta melalui BEJ tanggal 1 Juli 2000, yaitu; komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendalian (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan, komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan / atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan, komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan, komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal, komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholders* pada suatu entitas dapat dijumpai dengan adanya komisaris independen, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi auditor dalam pemberian opini *going concern*.

## **2.6 Kepemilikan Manajerial**

Gedeon dan Boediono (2005) menyatakan kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial meliputi pemegang saham yang memiliki kedudukan dalam perusahaan sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris atau biasanya disebut sebagai saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan. Kepentingan manajemen dapat dipengaruhi oleh besaran atas saham yang dimiliki karena keikutsertaan dalam kepentingan manajemen melalui kepemilikan manajerial.

Dengan adanya kepemilikan manajerial dengan jumlah kepemilikan saham yang tidak jauh berbeda sehingga menggambarkan kesamaan kepentingan, hal ini dapat mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham. Peningkatan nilai perusahaan dapat dilakukan oleh manajer dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Herawati (2008) menyatakan salah satu cara dalam mengurangi terjadinya manipulasi laba oleh pihak manajemen dapat dilakukan melalui keberadaan manajerial, dengan demikian pengawasan dapat dengan mudah dilakukan, nantinya akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi, sehingga pemberian opini oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan cenderung merupakan opini yang bersih (*clean opinion*).

## **2.7 Kepemilikan Institusional**

Ujiyanto dan Pramuka (2007) mendefinisikan kepemilikan institusional adalah jumlah presentasi hak suara yang dimiliki institusi. Untuk meningkatkan

kemakmuran para pemegang saham, melalui pengawasan yang ketat terhadap kinerja yang dilakukan oleh manajemen dengan keberadaan kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan institusi-institusi lain.

Janurati (2008) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Hal ini diharapkan adanya *monitoring* yang lebih baik atas keputusan manajemen, sehingga dapat mengurangi potensi kebangkrutan yang dapat mengimplikasikan auditor tidak memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen, sehingga akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga tercapainya peningkatan yang ditandai juga dengan harapan perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (Setiawan, 2011).

## **2.8 Komite Audit**

Komite audit merupakan suatu komite yang secara formal dibentuk oleh Dewan Komisaris, bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi kinerja pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal serta membantu auditor mempertahankan independensi terhadap manajemen (Nasution dan Setiawan, 2007). Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Peraturan No.IX.I.5 merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komite Audit.

Sementara menurut Utama (2004), tanggung jawab di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat

manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana dan komitmen jangka panjang. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengurangi resiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis.

## **2.9 Penelitian Terdahulu**

Adjani dan Rahardja (2013) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dalam jumlah yang banyak dari jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Ndoen (2011) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pemberian opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya proporsi komisaris independen dalam jumlah yang banyak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Adjani dan Rahardja (2013) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Ia menemukan bahwa proporsi kepemilikan pada perusahaan dalam jumlah yang banyak dapat menambah hak suara pada RUPS. Riyanda dan Indriani (2013) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Ia menemukan bahwa walaupun proporsi saham yang dimiliki oleh manajer dari jumlah saham yang beredar tidak memberikan pengaruh karena pihak manajemen lebih cenderung memakmurkan diri sendiri.

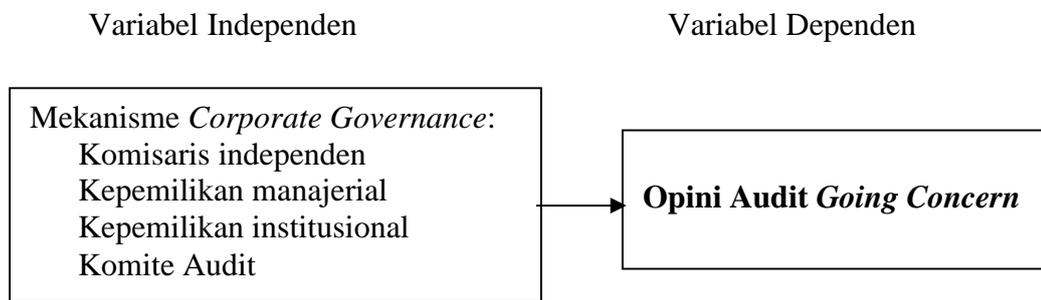
Linoputri (2010) meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Begitu juga dengan hasil penelitian Riyanda dan Indriani (2013), Adjani dan Rahardja (2013) dan Januarti (2009) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan yang ketat tidak menjamin bahwa auditor akan memberikan opini audit *going concern* karena untuk kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor bisa eksternal maupun internal. Irfan dan Muid (2012) meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang diprosikan dengan proporsi kepemilikan memberikan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan sedikitnya proporsi atas kepemilikan institusional.

Chandra (2013) meneliti pengaruh komite audit terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya komite audit tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan keberadaan komite audit pada suatu entitas tidak memberikan pengaruh terhadap kesangsian auditor atas keberlangsungan hidup perusahaan yang diaudit. Carcello dan Neal (2000) meneliti pengaruh komite audit terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya, komite audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Veronica dan Bachtiar (2004). Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memberikan pengaruh terhadap penyajian

laopran keungan yang bebas dari salah saji yang material sehingga opini yang diberikan auditor sesuai dengan harapan, keraguan auditor atas kelangsungan hidup perusahaanpun semakin kecil.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut :



**Gambar 1.1**

## 2.11 Pengembangan Hipotesis

### 2.11.1 Komisaris Independen dan Opini *Going Concern*

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa terdapat kepentingan yang berbeda antara pihak manajemen dengan pemilik saham sehingga munculah masalah. Sehingga dibutuhkan pengawasan dari pihak independen dalam hal ini komisaris independen agar manajemen bertindak sesuai dengan keinginan pemilik dan tidak melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan pemilik, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas (Adjani dan Rahardja, 2013).

Keberadaan komisaris independen telah diatur oleh bursa efek Jakarta melalui peraturan Kep-361/BEJ/06-2000 tanggal 1 Juli 2000 yang menjelaskan

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan yang tercatat di bursa harus memiliki Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*) dengan ketentuan jumlah Komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pengawasan dapat ditingkatkan melalui komisaris independen. Dengan adanya komisaris independen masalah keangenan antara pihak manajemen dengan pemegang saham dapat teratasi dengan pengawasan yang tinggi oleh komisaris independen, sehingga pemanipulasian atas laporan keuangan yang diperuntukkan untuk kepentingan manajemen dapat dicegah.

Setiawan (2011) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen didalam saham dalam jumlah yang banyak mampu menjamin transparansi laporan keuangan perusahaan serta mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku melalui hak suara pada RUPS.

Ndoen (2011) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pemberian opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya komisaris independen berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya komisaris independen dalam jumlah yang banyak dapat mengawasi para manajemen dalam menghasilkan laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan opini auditorpun sesuai dengan harapan pemilik perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa penelitian terdahulu, bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>1</sub> : Komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern***

### **2.11.2 Kepemilikan Manajerial dan Opini *Going Concern***

Berdasarkan teori agensi, dijelaskan bahwa terdapat benturan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga diperlukan adanya mekanisme insentif untuk mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, yaitu salah satunya melalui kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). Kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan opini audit *going concern*. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka semakin mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan, sehingga membuat hubungan manajer dengan pemegang saham menjadi selaras karena adanya kesamaan kepentingan.

Chandra (2013) menyatakan dalam mekanisme *corporate governance* terdapat kepemilikan manajerial yang berfungsi sebagai sarana *monitoring* yang efektif , dengan demikian diharapkan dapat memberikan kualitas yang tinggi atas laporan keuangan yang dibuat, sehingga opini audit yang diterima atas laporan keuangan perusahaan cenderung merupakan opini yang bersih (*clean opinion*).

Hasil penelitian Adjani dan Rahardja (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*. Ia menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern* semakin kecil.

Chandra (2013) menemukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*. Ia menyatakan besar kecilnya proporsi kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena dewan komisaris dan direksi baik yang memiliki saham di perusahaan atau tidak memiliki sama-sama bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki, yaitu untuk memelihara kesinambungan perusahaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa penelitian terdahulu, bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>2</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern***

### **2.11.3 Kepemilikan Institusional dan Opini *Going Concern***

Teori agensi menjelaskan adanya pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen untuk menjalankan perusahaan, serta adanya kepentingan prinsipal untuk memperoleh *return* yang besar dari investasinya. Oleh karena itu pemilik (prinsipal) melakukan *monitoring* atas aktivitas dan proses pengambilan keputusan oleh manajemen agar bertindak sesuai dengan keinginannya.

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan institusi-institusi lain. Adjani dan Rahardja (2013) menyatakan investor institusional memiliki peran sebagai mekanisme pengendali eksternal pada manajemen. Dampak positif dari investasi institusional menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu bertindak lebih efektif untuk memonitor aktivitas dan keputusan manajemen dibandingkan investor perorangan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Permanasari, 2010).

Januarti (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Dengan demikian, diharapkan adanya *monitoring* atas keputusan manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan yang berimplikasi pada kecilnya kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor pada perusahaan.

Linoputri (2010) meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Ia mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional yang berasal dari luar perusahaan dengan latar belakang keuangan tidak menjamin atas laporan keuangan yang dihasilkan karena pihak manajemen memiliki informasi dan mengetahui kondisi perusahaan lebih banyak.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa penelitian terdahulu, bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>3</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern***

#### **2.11.4 Komite Audit dan Penerimaan Opini *Going Concern***

Auditor terkadang mendapatkan tekanan dari manajemen dan pemegang saham atas pemberian opini auditnya. Manajemen tentunya menginginkan opini

audit atas laporan keuangannya yang bersih, dalam artian wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu, keberadaan komite audit sangat penting untuk meredakan tekanan terhadap auditor untuk menghasilkan opini yang wajar tanpa pengecualian.

Santosa dan Wedari (2007) menunjukkan bahwa komite audit berhubungan dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang saham karena kecurangan dan tindakan ilegal. Auditor yang melihat adanya tuntutan hukum pemegang saham akan menilai hal tersebut sebagai salah satu faktor keraguan akan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga ia akan memberikan opini *going concern* pada perusahaan tersebut.

Chandra (2013) meneliti pengaruh komite audit terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya komite audit tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Carcello dan Neal (2000) meneliti pengaruh komite audit terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya, komite audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Ia mengungkapkan bahwa komite audit yang dibentuk oleh dewan direksi memiliki wewenang untuk menjamin laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen bebas dari salah saji material.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa penelitian terdahulu, bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>4</sub> : Komite audit berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern***

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Objek yang diteliti lebih ditekankan pada kejadian yang sebenarnya dari pada orang mengenai kejadian (Indriantoro dan Supomo, 2002).

#### **3.2 Populasi dan sampel**

Populasi merupakan sekumpulan objek –objek yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terkait objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel merupakan sebagian kecil objek dari jumlah populasi. Sampel digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan yang dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2012, pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan sampel yang diinginkan, adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008 sampai dengan periode 2012.

2. Laporan keuangan tahunan perusahaan mengungkapkan informasi tentang tata kelola perusahaan yaitu, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa *annual report* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Data diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu situs resmi BEI, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com).

### **3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel**

#### **3.4.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit *going concern*. Opini audit *going concern* merupakan prediksi auditor terhadap kelangsungan hidup perusahaan, berdasarkan dengan opini audit yang telah mereka berikan setelah melakukan audit (Susanto, 2009). Variabel ini diukur dengan variabel *dummy*, dimana kategori 0 untuk pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan opini tersebut dikategorikan perusahaan *going concern*, sedangkan kategori 1 untuk pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjasar, pendapat wajar, pendapat tidak wajar dan tidak memberikan pendapat dengan demikian perusahaan dikategorikan *non going concern*. Variabel ini dinyatakan dengan lambang OGC.

#### **3.4.2 Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif atau pun negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 3.4.2.1 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Proporsi komisaris independen dapat dihitung dengan persentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris. Variabel ini dinyatakan dengan lambang KI. Penelitian Riyanda dan Indriani (2013) melakukan pengukuran proporsi komisaris independen dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan direksi. Adapun pengukuran proporsi komisaris independen yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Direksi}}$$

### 3.4.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh manajer, direktur, dan komisaris dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham perusahaan yang dimiliki manajer, direktur dan komisaris dari seluruh modal saham yang beredar. Variabel ini dinyatakan dengan lambang KM. Riyanda dan Indriani (2013) melakukan pengukuran kepemilikan manajerial dengan membagi jumlah saham yang dimiliki manajerial dengan jumlah saham yang beredar. Adapun pengukuran kepemilikan manajerial yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

### **3.4.2.3 Kepemilikan Institusional**

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh seluruh institusi pemegang saham perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki seluruh institusi pemegang saham perusahaan dari seluruh modal saham yang beredar. Variabel ini dinyatakan dengan lambang KIN. Riyanda dan Indriani (2013) melakukan pengukuran kepemilikan institusional dengan membagi jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Adapun pengukuran proporsi komisaris independen yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

### **3.4.2.4 Komite Audit**

Peraturan BAPEPAM No.IX.I.5 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Waryanto (2010) melakukan pengukuran frekuensi rapat komite audit dengan menggunakan jumlah rapat yang dilakukan dalam satu tahun.

## **3.5 Metode Analisis**

Data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian dianalisis dan diinterpretasikan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci, untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah:

### 3.5.1 Regresi Logistik

Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk melihat sejauh mana probabilitasnya terjadi. Pada analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2006).

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

$$\text{Log}(\text{OGC}/1-\text{OGC}) = + 1\text{KI} + 2\text{KM} + 3\text{KIN} + 4\text{KA} +$$

Keterangan :

Log (OGC/-1OGC) = Opini dengan *unqualified opinion* dikategorikan *going concern* sedangkan *non going concern* opini kecuali *unqualified opinion*.

= Konstanta

1, 2, 3, 4, = Koefisien Regresi

KI = Komisaris Independen Dewan

KM = Kepemilikan Manajerial

KIN = Kepemilikan Institusional

KA = Komite audit

= Error

### 3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas yaitu proporsi komisaris independen (KI), kepemilikan manajerial (KM), kepemilikan institusional (KIN) dan komite audit (KA) terhadap variabel terkait yaitu opini audit *going concern*. Tahapan untuk menilai kelayakan model regresi dengan regresi logistik terdapat tiga kriteria dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

**a. Menilai Kelayakan Model Regresi**

Analisis ini digunakan untuk melihat apakah model yang dihipotesiskan fit dengan data. Tes statistik yang digunakan untuk menilai data ini adalah *Chi Square Hosmer and Lemeshow*. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka model regresi logistik dapat digunakan untuk analisis berikutnya (Ghozali, 2006) ;

**b. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)**

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai dari *Log Likelihood* awal dengan *Log Likelihood* tahap berikutnya. Adanya pengurangan nilai antara -2 *Log Likelihood* awal dengan -2 *Log Likelihood* pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2006). *Log likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian “*sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan *Log likelihood* menunjukkan model regresi yang semakin baik (Ghozali, 2006).

**c. Model Summary**

*Model summary* dalam regresi logistik sama dengan pengujian  $R^2$  pada persamaan regresi linear. Tujuan dari *Model summary* adalah untuk mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen yang terdiri dari komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu opini audit *going concern* (Ghozali, 2006).

**3.6.2 Menguji Koefisien Regresi**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen (komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu opini audit *going concern* (Ghozali, 2006). Pengujian pengajuan hipotesis

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan ( ) sebesar 5 persen (0,05). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value* (probabilitas value). Jika nilai signifikan diatas 5% berarti masing-masing variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Demikian juga sebaliknya, jika nilai signifikansi berada di bawah nilai 5% berarti masing – masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.